

**PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA SANITARIAN DALAM  
MENJALANKAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN DI  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**Oleh :  
Al Fana Akbar Salim  
E1A014111**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan perlindungan hukum dan bentuk perlindungan hukum tenaga sanitarian dalam menjalankan pelayanan kesehatan lingkungan di Pusat Kesehatan Masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan analitis (*Analytical Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah inventarisasi hukum, sinkronisasi hukum dan penemuan hukum *in concreto*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumenter.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan hukum tenaga sanitarian dalam menjalankan pelayanan kesehatan lingkungan di Pusat Kesehatan Masyarakat telah menunjukkan taraf sinkronisasi. Artinya, bahwa antara peraturan yang lebih rendah derajatnya telah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya dan peraturan yang lebih tinggi derajatnya menjadi dasar pembentukan peraturan yang lebih rendah. Bentuk perlindungan hukum tenaga sanitarian dalam menjalankan pelayanan kesehatan lingkungan di Pusat Kesehatan Masyarakat meliputi jaminan pengaturan memiliki satu suara, memilih dan dipilih dalam organisasi profesi, jaminan pengaturan perlindungan hukum, jaminan pengaturan tentang informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya, jaminan pengaturan melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangan, jaminan pengaturan imbalan jasa, jaminan pengaturan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan pengaturan tentang perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama, jaminan pengaturan pengembangan profesi, jaminan pengaturan untuk menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan kompetensi, kewenangan, standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jaminan pengaturan hak lain.

***Kata kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Sanitarian, Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Pusat Kesehatan Masyarakat***

**SANITARIAN LEGAL PROTECTION IN RUNNING THE  
ENVIRONMENTAL HEALTH SERVICES IN THE COMMUNITY  
HEALTH CENTER**

*By:*

**Al Fana Akbar Salim**

**E1A014111**

**ABSTRACT**

*This study aims to determine synchronization of legal protection arrangements and forms of legal protection for sanitarians in carrying out environmental health services at the Community Health Center.*

*The research method used in this study is a normative juridical method with the statutory approach method (Statue Approach), analytical approach (Analytical Approach), and conceptual approach (Conceptual Approach). The research specifications used are legal inventory, legal synchronization and legal discovery in convention. The type of data used is secondary data obtained from literature study and documentaries.*

*Based on the results of the research, it can be concluded that the regulation regarding the legal protection of sanitarians in carrying out environmental health services at the Community Health Center has shown a degree of synchronization. This means that between a lower level of regulation is in accordance with a higher degree regulation and a higher degree regulation becomes the basis for the formation of a lower regulation. Forms of legal protection for sanitarians in carrying out environmental health services in Community Health Centers include guaranteeing that they have one voice, electing and being elected in professional organizations, guaranteeing legal protection arrangements, guaranteeing arrangements for complete and correct information from health service recipients or their families, guaranteeing arrangements carry out tasks in accordance with competence and authority, guarantee service compensation arrangements, guarantee protection arrangements for occupational safety and health, guarantee regulatory arrangements in accordance with human dignity and values, morals, decency, and religious values, guarantee for professional development arrangements, guarantees arrangements to reject the wishes of recipients of health services that conflict with competence, authority, professional standards, code of ethics, service standards, standard operating procedures, or statutory provisions, and guarantees for other rights settings.*

***Keywords: Legal Protection, Sanitarian Workers, Environmental Health Services, Community Health Centers***